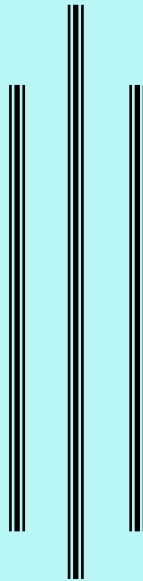




PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2024



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMWIL, SSTP., M.M.

Jabatan : Camat Silaut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,
**CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,0)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5,20%
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	80%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.940.100	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	49.800.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	97.020.500	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.144.500	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.786.000	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.072.000	APBD
Total Anggaran		285.763.100	APBD

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI PESISIR SELATAN



(Drs. **RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**)

Pihak Pertama,
CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN



(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASAN BASRI, S.Pi.**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMWIL, SSTP.,M.M.**

Jabatan : Camat Silaut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

**CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESIR SELATAN**

(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003

Pihak Pertama,

SEKRETARIS


(HASAN BASRI, S.Pi.)
NIP.19831001 200803 1002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas baik	100%
		Tingkat kelancaran administrasi keuangan	100%
2.	Meningkatkan Produktifitas Kinerja Aparatur Kecamatan sehingga Pelayanan Kepada Masyarakat Semakin Baik.	Persentase tingkat kehadiran PNS lingkup Kecamatan	100%
		Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	75

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT SILAUT

KABUPATEN PESISIR SELATAN



(ISYAMU IL, SSTP., M.M.)
NIP.19820113 200112 1 003

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

(HASAN BASRI, S.PI.)
NIP.19831001 200803 1002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PUJI ASTUTI, S.E.**

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **SYAMWIL, SSTP.,M.M.**

Jabatan : Camat Silaut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaut, 24 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA,
KASI PEMERINTAHAN**

**(PUJI ASTUTI, S.E.)
NIP. 19721220 201407 2 002**



**PIHAK KEDUA,
CAMAT SILAUT**
**(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KASI PEMERINTAHAN

ESELON IV-a

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari,	Dokumen rencana kerja kegiatan	1 dokumen
2.	Terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari, pelaksanaan administrasi Nagari, pembinaan aparatur pemerintahan nagari.	Jumlah nagari yang difasilitasi dan dibina	10 Nagari
3.	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.	Jumlah Nagari yang dibina	10 Nagari
4.	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan wali nagari, penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari	Jumlah pelaksanaan pilwara dan bamus yang difasilitasi	10 Nagari

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 481.977.000	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 29.072.000	APBD
Total Anggaran		Rp. 511.049.000	APBD

Silaut, 24 Januari 2024



PIHAK KEDUA
CAMAT SILAUT

(SYAMWIL, SSTP.,M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003

PIHAK PERTAMA
KASI PEMERINTAHAN

PUJI ASTUTI, S.E.
NIP. 19721220 201407 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM ESELON IV-a

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NOVRIZAL. S.Sos.**

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **SYAMWIL, SSTP.,M.M.**

Jabatan : Camat Silaut

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaut, 24 Januari 2024



(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP.19820113 200112 1 003

**PIHAK PERTAMA,
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

(NOVRIZAL, S.Sos) .
NIP.19681101 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
ESELON IV-a

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya program kerja pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah program kerja pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana	Jumlah laporan Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan	1 laporan
3.	Terlaksananya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	1 Laporan
4.	Terinventarisirnya jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum	Jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dan telah ditindaklanjuti	1 Kasus

Silaut, 24 Januari 2024



(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP.19820113 200112 1 003

Pihak Pertama
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

(NOVRIZAL, S.Sos.)
NIP.19681101 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRI DWI ATMONO, S.E.**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMWIL, SSTP., M.M.**

Jabatan : Camat Silaut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaut, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,


**CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003

Pihak Pertama,

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREKONOMIAN**


(ANDRI DWI ATMONO, S.E.)
NIP. 19780429 200902 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Rencana Kerja Kegiatan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan Musyawarah Nagari	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Nagari, Koordinasi dan Fasilitasi Terhadap Pengembangan dan Pembinaan Perekonomian dan Sumber daya Manusia dan Sumber Daya Alam	Jumlah Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Di Fasilitasi	10 Lembaga
4.	Meningkanya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah Kecamatan Silaut	1 Dokumen

Silaut, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

KAMAT SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAMWIL, SSTP., M.M.)
 NIP. 19820113 200112 1 003

Pihak Pertama,

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREKONOMIAN



(ANDRI DWIATMONO, S.E.)
 NIP. 19780429 200902 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TUSRI, S.Pd.**

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMWIL, SSTP., M.M.**

Jabatan : Camat Silaut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

**CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESIR SELATAN**

(SYAMWIL, SSTP., M.M.)
NIP. 19820113 200112 1 003

Pihak Pertama,

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL


TUSRI, S.Pd.
NIP. 19710901 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Peranan Wanita.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Kegiatan	1 Dokumen
2.	Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Kegiatan	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pendataan Keluarga Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Kesejahteraan Masyarakat.	Data Keluarga Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen
4.	Terkoordinasinya Penyaluran Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;	Jumlah Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	1 Laporan

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT SILAUT

KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL



TUSRI S.Pd.

NIP. 19710901 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ELNI.**

Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAMWIL, SSTP., M.M.**

Jabatan : Camat Silaut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

**CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Pihak Pertama,

KASI PELAYANAN

(ELNI)

NIP. 197011171994032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Tersusunnya rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan	Rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan	2 laporan
2.	Tersusunnya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan	Laporan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan	12 laporan
3.	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN	Jumlah laporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN	4 laporan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.434.438.388	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	49.800.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	97.020.500	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	17.144.500	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.786.000	APBD
Total Anggaran		1.604.369.388	APBD

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

CAMAT SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN



(SYAMUEL, SSTP., M.M.)
NIP. 19870113 200112 1 003

Pihak Pertama,

KASI PELAYANAN


(ELNI)

NIP. 197011171994032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RETNANINGSIH, S.E.**

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HASAN BASRI, S.Pi.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

(HASAN BASRI, S.Pi.)

NIP.19831001 200803 1002

Pihak Pertama,

**KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**

(RETNANINGSIH, S.E.)

NIP.19841114 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Administrasi Perencanaan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (Renstra, Renja-Renja Perubahan, DPA-DPA Perubahan, IKU dan Rencana Aksi)	7 Dokumen
2.	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaporan Kecamatan yang Akuntabel	Jumlah Rekonsiliasi Keuangan yang Dilaksanakan	12 laporan
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang baik dan benar (LKJIP, LKPj dan PK)	3 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan SKPD Triwulanan yang Tersusun Tepat Waktu	8 Laporan
		Jumlah Laporan Akhir Tahun OPD yang Disusun (LRA, Neraca, CaLK)	3 Laporan
3.	Terlaksananya Perbendaharaan dan Gaji	Jumlah Pemenuhan Urusan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
4.	Terlaksananya verifikasi dan akuntansi	Jumlah Laporan SPJ Kegiatan yang Diverifikasi	4 Laporan

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS



(HASAN BASRI, S.Pi.)

NIP.19831001 200803 1002

Pihak Pertama,

**KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**



(RETNANINGSIH, S.E.)

NIP.19841114 200902 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OMRI, S.E.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HASAN BASRI, S.Pi.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

(HASAN BASRI, S.Pi.)
NIP.19831001 200803 1002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

(OMRI, S.E.)
NIP.19750603 200003 1002

KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya ketatalaksanaan kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun secara lengkap dan tepat waktu (Anjab, SKP, Absensi, Berkala, Naik Pangkat, Peta Jabatan, Bezeting, DUK, SK Camat, Rekomendasi)	10 Dokumen
		Persentase kedisiplinan kepegawaian sesuai dengan data Absensi	100%
2.	Terlaksananya Penatausahaan perlengkapan kantor dan pengelolaan barang milik daerah	Tersedianya penatausahaan perkantoran	1 Dokumen
		Tersedianya ketatalusahaan barang milik daerah	1 Dokumen
3.	Terlaksananya ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan	Jumlah arsip surat masuk, arsip surat keluar dan arsip SPJ yang tertata dengan baik	3 Dokumen

Painan, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

(HASAN BASRI, S.Pi.)

NIP.19831001 200803 1002

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

(OMRI, S.E.)

NIP.19750603 200003 1002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSIHAN KHALIK, M. Sos.**
Jabatan : **Analisis Pemberdayaan Masyarakat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRI DWI ATMONO, S.E.**
Jabatan : **Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

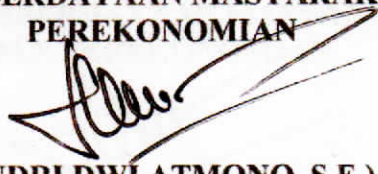
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaut, 23 Januari 2024

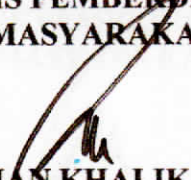
Pihak Kedua,

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEREKONOMIAN**


(ANDRI DWI ATMONO, S.E.)
NIP. 19780429 200902 1 006

Pihak Pertama,

**ANALIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**


(ROSIHAN KHALIK, M. Sos.)
NIP. 19930705 202012 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

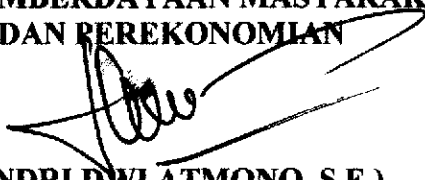
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Terlaksananya Rencana Kerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen Rencana Kerja Kegiatan	1 dokumen
2.	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Dokumen Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	5 Dokumen
		Dokumen Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	4 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Pengembangan serta Pembinaan Perekonomian Masyarakat	Dokumen dari Jumlah Produk Unggulan Nagari atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Nagari yang Dibina	1 Dokumen
		Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang Difasilitasi/dibina	1 Dokumen
4	Terlaksananya Inovasi Daerah di Tingkat Kecamatan Silaut	Dokumen Kematangan Inovasi Daerah Di Tingkat Kecamatan Silaut	2 Dokumen

Silaut, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREKONOMIAN**


(ANDRI DWI ATMONO, S.E.)
NIP. 19780429 200902 1 006

Pihak Pertama,

**ANALIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**


(ROSIHAN KHALIK, M. Sos.)
NIP. 19930705 202012 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSSI PERMATA SARI, A.Md.**

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RETNANINGSIH, S.E.**

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**

(RETNANINGSIH, S.E.)

NIP. 19841114 200902 2 003

Pihak Pertama,

VERIFIKATOR KEUANGAN

(YOSSI PERMATA SARI, A.Md.)

NIP.199802112020122010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terverifikasinya bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas yang telah sesuai dengan peruntukannya.	Jumlah berkas yang diverifikasi dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas telah sesuai dengan peruntukannya	11 Berkas
2.	Tersusunnya bukti-bukti pengeluaran, penerimaan dan buku kas sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian.	Jumlah berkas yang disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian.	11 Berkas
3.	Terlaksananya verifikasi atau pemeriksaan terhadap seluruh dokumen SPJ administrasi keuangan.	Jumlah SPJ Kegiatan yang Diverifikasi	4 Laporan
4.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan	LHP yang ditindaklanjuti	1 laporan
5.	Terverifikasinya Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS	Jumlah berkas Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS yang terverifikasi	74 Berkas

Silaut, 23 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**



(RETNANINGSIH, S.E.)
NIP.19841114 200902 2 003

Pihak Pertama,

VERIFIKATOR KEUANGAN



(YOSSI PERMATA SARI, A.Md.)
NIP.199802112020122010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ADRIANTO**

Jabatan : Staf Pengadministrasian Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **PUJI ASTUTI,SE**

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Silaut, 24 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,
KASI PEMERINTAHAN**

(PUJI ASTUTI, S.E.)
NIP. 19721220 201407 2 002

**PIHAK PERTAMA,
STAF PENGADMINISTRASIAN
PEMERINTAHAN**

(ADRIANTO.)
NIP. '197009052007011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STAF PENGADMINISTRASIAN PEMERINTAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penghimpunan data dan informasi	Dokumen rencana kerja kegiatan	1 dokumen
2.	Terlaksananya penatausahaan administrasi Pemerintahan	Dokumen administrasi	1 dokumen
3.	Terlaksananya Penyusunan konsep Surat di Bidang Pengelolaan Adminstrasi Pemerintahan	Dokumen Surat	1 dokumen
4.	Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Nagari yang melaksanakan kegiatan	10 Nagari

Silaut, 24 Januari 2024

PIHAK KEDUA
KASI PEMERINTAHAN



(PUJI ASTUTI, S.E.)
NIP. 19721220 201407 2 002

PIHAK PERTAMA
KASI PEMERINTAHAN



(ADRIANTO.)
NIP. '197009052007011008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611
Telepon : (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el setda@pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 29 Februari 2024

Nomor : 100.3.4.2/2/Bapedalitbang/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024**

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perjanjian Kinerja di awal tahun.

Maka di instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai draft yang telah disepakati terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 100.3.4.2/2/Bapedalitbang/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

DRAFT REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	No	Sasaran Strategis	No	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (85)
		2	Menurunnya pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,6
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
		4	Meningkatnya koperasi berkualitas	4	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	35%
		5	Meningkatnya Daya Saling Sektor Unggulan	5	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	Persen	78%
2	DINAS PARAWISATA, KEPEMUDAAN DAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (85)
		2	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	2	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	2.150.000
				3	Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25
		3	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saling	4	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Persen	1
		4	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	5	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional	Orang	20
				6	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
3	DINAS PMPTSP	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (83,5)
		2	Meningkatnya Keberbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	84
		3	Meningkatkan investasi PMA dan PMDN	3	Nilai Investasi swasta dan masyarakat	Rupiah	925.000.000.000
		4	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
4	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (82)
		2	Meningkatnya kemandirian kawasan Transmigrasi	2	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Tanpa Satuan	76,61
		3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	6,5
				4	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian	Persen	4,5
				5	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Miliar Rupiah	758
		4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	6	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	tanpa satuan	A (88)
		2	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	tanpa satuan	73,07
		3	Terwujudnya Keluarga Bahagia	3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	93,203
		4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (84,5)
		2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	33,9
				3	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	Persen	62,6
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
7	DINAS PERHUBUNGAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)
		2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2	Rasio Kemakmuran	Tanpa Satuan	0,58
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (84,5)
		2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	2	Indeks SPBE	Tanpa Satuan	4,2
		3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	3	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tanpa Satuan	4,5
		4	Meningkatnya Keberbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	4	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Tanpa Satuan	99,95 (Informatif)
		5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100

9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)
		2	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53
				3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,6
		3	Meningkatnya Daya Saing Pendidikan	5	Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	3
				6	Jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi atau nasional	Orang	5
		4	Meningkatnya Pemasukan Kebudayaan Daerah	7	Persentase Cagar Budaya terregister yang menjadi Tujuan Wisata	Persen	77
				8	Persentase WBTB yang ditetapkan menjadi Tujuan Wisata	Persen	100
		5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	9	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
10	DINAS KESEHATAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (87)
		2	Meningkatnya Kualitas kesehatan keluarga masyarakat	2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jiwa	135/ 100.000 KH
				3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jiwa	11/ 1000 KH
				4	Prevalensi Stunting	Persen	7,00
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	6	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
11	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,1)
		2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	3	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	Tanpa Satuan	58
		3	Terwujudnya Keluarga Bahagia	4	Proporsi tamuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Persen	0,048
		4	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	5	Indeks Kesejahteraan Sosial	Tanpa Satuan	80
		5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	6	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
12	DPMPPKB	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)
				2	Persentase Nagari Mandiri	Persen	17,58%
		2	Terwujudnya Keluarga Bahagia	3	Indeks Pembangunan Keluarga	Tanpa Satuan	61
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
13	DINAS PERTANIAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (89,5)
		2	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	2	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Triliun	3,1
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
14	BPBD	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (87)
		2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	2	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Nagari	15
				3	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	Nagari	2
				4	Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	Nagari	5
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
15	SATPOL PP DAN DAMKAR	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81)
		2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	100
				3	Cakupan rasio petugas linmas	Persen	100
				4	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
16	BKPSDM	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)
		2	Meningkatnya Daya Saing ASN	2	Indeks Profesionalitas ASN	Tanpa Satuan	68
				3	Indeks Merit Sistem	Tanpa Satuan	252
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
17	SEKRETARIAT DPRD	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,5)
				2	Persentase fasilitasi fungsi DPRD	Persen	100
		2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100

18	SETDA	1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Nilai SAKIP	Tanpa Satuan	70,1 (BB)
				2	Nilai LPPD	Tanpa Satuan	2,61 (Sedang)
				3	Persentase Kinerja kepala PD yang mencapai target	Persen	93%-100% (Sangat Baik)
		2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	4	Laju Inflasi Daerah	Persen	3%
		3	Meningkatnya kualitas inovasi setda	5	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
19	INSPEKTORAT	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)
		2	Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2	Level Maturitas SPP	Tanpa Satuan	3 (3,1)
				3	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Tanpa Satuan	16,00
		3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	4	Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP
		4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
20	BAPEDALITBANG	1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Tanpa Satuan	24,41
				2	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Tanpa Satuan	18,32
		2	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	3	Nilai AKIP Bapedalitbang	Tanpa Satuan	AA (90,1)
		3	Meningkatnya peran keltbangan dalam pembangunan daerah	4	Persentase kajian, keltbangan yang diterapkan dalam perencanaan	Persen	90%
				5	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,52 (sangat inovatif)
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			6	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
		1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (83)
		2	Meningkatkan Literasi Masyarakat	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	7,974
		3	Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	3	Indeks Pemanfaatan Arsip	Tanpa Satuan	50
		4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
22	BPKPAD	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (89)
		2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP
				3	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Tanpa Satuan	10,9
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
23	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,5)
		2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	2	Pencapaian skor pola pangan harapan	Persen	87,0
		3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3	Produksi Perikanan	Ton	50.694
		4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
24	DISDUKCAPIL	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)
		2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	91
				3	Cakupan Layanan Adminduk dan Capil	Persen	100
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
25	BADAN KESBANGPOL	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,2)
		2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	2	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	Persen	100
				3	Cakupan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	40
		3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 100.3.4.2/2/Bapedalitbang/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

DRAFT REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA CAMAT SE - KABUPATEN PESAWIR SELATAN TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,5)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGM)	Persen	7,00%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
2	KECAMATAN BAYANG	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (74,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGM)	Persen	4,50%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
3	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (76,5)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGM)	Persen	7,00%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
4	KECAMATAN IV JURAI	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71,5)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGM)	Persen	5,64%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
5	KECAMATAN BATANG KAPAS	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (80,5)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGM)	Persen	7,00%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
6	KECAMATAN SUTERA	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (74,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGM)	Persen	7,00%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%

7	KECAMATAN LENGAYANG	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGBM)	Persen	5,69%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
8	KECAMATAN RANAH PESISIR	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (83,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGBM)	Persen	7,00%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
9	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	B (61,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGBM)	Persen	7,00%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
10	KECAMATAN AIRPURA	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (78,5)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGBM)	Persen	3,07%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
11	KECAMATAN PANCUNG SOAL	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (75,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPGGBM)	Persen	6,41%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%

12	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (74,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	1,74%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
13	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,5)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	5,36%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
14	KECAMATAN LUNANG	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	2,51%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%
15	KECAMATAN SILAUT	1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (81,0)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	85
		3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	3	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	4	Persentase Nagari yang memiliki administrasi baik	Persen	75%
				5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0%
				6	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Persen	5,20%
		5	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan	7	Persentase Konflik yang diselesaikan	Persen	80%

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MAWARDI ROSKA